

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Semakin tinggi dan baik kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula kualitas bangsa. Jika suatu bangsa berhasil menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diharapkan sumber daya manusia tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Menurut Ali (2009:7) tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, antar penduduk. Ia pun menyatakan bahwa pembangunan pendidikan nasional dihadapkan pada dua pilihan prioritas, yaitu pemerataan akses dan peningkatan kualitas pada berbagai jenjang pendidikan.

Kedua pilihan tersebut pun sama-sama berimplikasi pada pembiayaan yang berbeda-beda. Sehingga pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah

yang sangat rumit. Ketidak merataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, namun sayangnya peraturan ini hanya sampai ditingkat sekolah menengah pertama saja.

Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dengan tujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam penerapan program ini diharapkan semua anak bangsa bisa merasakan pendidikan merata hingga tingkat SMA, hal ini bertujuan agar mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan bekal bagi anak bangsa untuk bisa menghadapi dunia kerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari salah satu indikator dari penuntasan program wajib belajar yakni Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gorontalo seperti tabel 1.1 dibawah ini

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1	SD/MI	95.61	121.03
2	SMP/MTs	63.79	88.48
3	SMA/SMK/MA	42.92	62.98

Sumber: Badan Statistik Gorontalo 2012-2014

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gorontalo SD/MI/Paket A sebesar 95.61, SMP/MTS/Paket B sebesar 63.79, SMA/MA/Paket C sebesar 42.92. Hal ini menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gorontalo masih dibawah rata-rata yang disebabkan masih banyaknya masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Gorontalo diantaranya tigginya angka kemiskinan dan beban ketergantungan masyarakatnya, angka partisipasi pendidikan yang masih rendah, dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang belum memadai, serta anggaran yang di khususkan buat pendidikan belum mendukung akses pelayanan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka demikian program wajib belajar 12 tahun perlu ditindak lanjuti, mengingat bahwa masih banyak masalah yang muncul mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Maka, dengan hal ini penulis berkeinginan untuk membahas tentang “Evaluasi

Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Gorontalo Cerdas, program unggulan, pendidikan gratis, dan pertumbuhan penduduk sebagai konteks wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana tenaga pedidik, usia sekolah, sarana prasarana, dan keuangan sebagai input wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana penerimaan siswa baru dan pembiayaan pendidikan sebagai proses evaluasi wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo?
4. Bagaimana hasil belajar siswa, APM, APK, dan rata-rata kelulusan sebagai produk evaluasi wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Gorontalo Cerdas, program unggulan, pendidikan gratis, dan pertumbuhan penduduk sebagai konteks wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui tenaga pendidik, usia sekolah, sarana prasarana, dan keuangan sebagai input wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui penerimaan siswa baru dan pembiayaan pendidikan sebagai proses evaluasi wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.
4. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa, APM, APK, dan rata-rata kelulusan sebagai produk evaluasi wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi Dinas Pendidikan, dapat memberikan informasi faktual tentang kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi terhadap program wajib belajar 12 tahun agar dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan tentang visi pendidikan sehingga dapat menyukseskan dan mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
3. Bagi siswa, dapat memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam mengikuti program wajib belajar 12 tahun.
4. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai program wajib belajar 12 tahun dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan, serta membuktikan kesesuaian teori dengan di lapangan.